

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia masalah utama yang masih menjadi fokus pemerintah yaitu mengenai kemiskinan. Tidak bisa dipungkiri kemiskinan masih menjadi salah satu masalah yang menjadi pusat perhatian di negara berkembang ataupun negara maju. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,42 juta orang, mengalami kenaikan sebesar 5,09% dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 25,14 juta orang.

Kemiskinan tidak lagi dipandang sebatas ketidakmampuan mengenai ekonomi saja, tapi juga kegagalan untuk memenuhi kebutuhan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kebutuhan akan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, pekerjaan, pertanahan, dan sumber daya alam. Kemiskinan merupakan suatu masalah kompleks yang terjadi akibat adanya beberapa faktor yang saling berhubungan misalnya seperti tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, pendidikan, kesehatan, lokasi, geografis, dan gender.

Kemiskinan dapat berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi disuatu negara, wilayah baik pusat maupun daerah. Kemiskinan yang tinggi dapat menyebabkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam pembangunan ekonomi. Selain berdampak terhadap pembangunan ekonomi, kemiskinan juga akan menimbulkan masalah-masalah sosial dan juga masalah kriminal. Ketika kemiskinan terus meningkat dan tidak ada upaya dalam penanggulangannya tentu dapat memicu timbulnya masalah sosial yang lebih kompleks.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan dapat diukur dengan menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka kemiskinan dapat diartikan dengan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang berasal dari segi pengeluaran. Penduduk dengan pengeluaran bulanan rata-rata sesuai dengan kapita di bawah garis kemiskinan disebut dengan jumlah penduduk miskin. Garis Kemiskinan (GK) menggambarkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari yang meliputi kebutuhan makanan dan non-makanan.

Di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat banyak ditemukan masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan dengan rendahnya upah minimum kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan biaya hidup yang dijalani, tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi, masih rendahnya kualitas hidup manusia, dan juga pendapatan asli daerah yang berfluktuasi dari tahun ke tahun, hingga semakin banyaknya jumlah penduduk miskin yang terus meningkat setiap tahunnya di Jawa Barat yang akan diuraikan dibagian selanjutnya.

Di Jawa Barat kemiskinan masih menjadi satu permasalahan sosial yang serius. Hal ini dibuktikan pada tahun 2020 Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat tercatat memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak nasional di urutan ke-2 sebesar 4,188 juta jiwa, setelah Provinsi Jawa Timur yang berada di urutan ke-1 dengan jumlah sebanyak 4,585 juta jiwa kemudian di peringkat ke-3 ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah sebanyak 4,119 juta jiwa.

Di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tercatat memiliki persentase penduduk miskin di atas rata-rata Jawa Barat sebesar 8 % (persen). Hal ini

menggambarkan bahwa jumlah penduduk miskin masih menjadi masalah utama yang harus menjadi fokus dan perhatian pemerintah.

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021

JAWA BARAT	Persentase Penduduk Miskin (%)		
	2019	2020	2021
Bogor	7.14	7.69	8.13
Sukabumi	6.76	7.09	7.70
Cianjur	9.81	10.36	11.18
Bandung	6.65	6.91	7.15
Garut	9.27	9.98	10.65
Tasikmalaya	9.85	10.34	11.15
Ciamis	7.22	7.62	7.97
Kuningan	12.22	12.82	13.10
Cirebon	10.70	11.24	12.30
Majalengka	10.79	11.43	12.33
Sumedang	9.76	10.26	10.71
Indramayu	11.89	12.70	13.04
Subang	8.67	9.31	10.03
Purwakarta	7.99	8.27	8.83
Karawang	8.06	8.26	8.95
Bekasi	4.37	4.82	5.21
Bandung Barat	10.06	10.49	11.30
Pangandaran	8.12	8.99	9.65
Kota Bogor	5.93	6.68	7.24
Kota Sukabumi	7.12	7.70	8.25
Kota Bandung	3.57	3.99	4.37
Kota Cirebon	8.88	9.52	10.03
Kota Bekasi	4.11	4.38	4.74
Kota Depok	2.14	2.45	2.58
Kota Cimahi	4.94	5.11	5.35
Kota Tasikmalaya	12.71	12.97	13.13
Kota Banjar	5.70	6.09	7.11

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan pada tabel 1.1 mengenai persentase jumlah penduduk miskin di atas, dapat dilihat bahwa kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat

pada tahun 2021 memiliki persentase penduduk miskin di atas rata-rata Jawa Barat yang tergolong tinggi yaitu berada di atas 8.97% (persen). Ada beberapa kabupaten/kota yang berada jauh di atas rata-rata Jawa Barat yaitu diantaranya Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kota Cirebon, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya.

Adanya kemiskinan dipengaruhi oleh semakin tingginya tingkat pengangguran terbuka, rendahnya kesejahteraan hidup manusia yang tercermin kepada rendahnya indeks pembangunan manusia, upah minimum yang tidak sebanding dengan biaya hidup, dan rendahnya pendapatan asli daerah yang berakibat kepada ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan yaitu masalah pengupahan, rendahnya upah yang diterima masyarakat akan berpengaruh terhadap pendapatan yang akan diterima. Maka pendapatan yang rendah tersebut tidak bisa dipungkiri tidak bisa digunakan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Tidak sebandingnya upah minimum kabupaten/kota dengan biaya hidup sehari-hari membuat masyarakat dengan pendapatan per kapita dibawah garis kemiskinan sulit untuk keluar dari kemiskinan. Dengan adanya peningkatan upah minimum pekerja diharapkan akan mampu meningkatkan daya beli, yang diharapkan dapat merangsang semangat kerja dan efisiensi kerja.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1999 mengatakan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atau Upah Minimum

Sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk. II) merupakan upah minimum yang berlaku di kabupaten/kotamadya.

Tabel 1.2 Upah Minimum Kabupaten/Kota Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021

JAWA BARAT	UMK Rp/Org/Tahun		
	2019	2020	2021
Bogor	3.763.405	3.763.405	4.217.206
Sukabumi	2.791.016	2.791.016	3.125.444
Cianjur	2.336.004	2.336.004	2.534.798
Bandung	2.893.074	2.893.074	3.241.929
Garut	1.807.285	1.807.285	1.961.085
Tasikmalaya	2.075.189	2.075.189	2.251.787
Ciamis	1.733.162	1.733.162	1.880.654
Kuningan	1.734.994	1.734.994	1.882.642
Cirebon	2.024.160	2.024.160	2.269.556
Majalengka	1.791.693	1.791.693	2.009.000
Sumedang	2.893.074	2.893.074	3.241.929
Indramayu	2.117.713	2.117.713	2.373.073
Subang	2.732.899	2.732.899	3.064.218
Purwakarta	3.733.399	3.722.299	4.173.568
Karawang	4.234.010	4.234.010	4.798.312
Bekasi	4.146.126	4.146.126	4.791.843
Bandung Barat	2.898.744	2.898.744	3.248.283
Pangandaran	1.714.673	1.714.673	1.860.591
Kota Bogor	3.842.785	3.840.785	4.169.806
Kota Sukabumi	2.331.752	2.331.752	2.530.182
Kota Bandung	3.339.380	3.339.580	3.742.276
Kota Cirebon	2.045.422	2.045.422	2.271.201
Kota Bekasi	4.229.756	4.229.756	4.782.935
Kota Depok	3.872.551	3.872.551	4.339.514
Kota Cimahi	2.893.074	2.893.074	3.241.929
Kota Tasikmalaya	2.086.529	2.086.529	2.264.093
Kota Banjar	1.688.217	1.688.217	1.831.884

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat dan SK Gubernur Jawa Barat.

Menurut Gindling dan Terrel (2007) pada kutipan Maulidina M.A dan Pratomo D.S (2018) mengatakan bahwa kenaikan upah minimum akan

mempengaruhi peningkatan jam kerja pada pekerja yang memiliki keahlian yang tinggi dengan demikian pekerja yang memiliki keahlian rendah akan mengalami pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Hal ini dilakukan guna menyelamatkan perusahaan yang akan mengalami kerugian karena kenaikan upah minimum. Kenaikan upah minimum kabupaten/kota turut andil menyumbang pada persentase jumlah penduduk miskin karena adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan.

Berdasarkan pada tabel 1.2 di atas, di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) walaupun kenaikan yang diterima tidak terlalu besar secara riil. Pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan provinsi lain UMP Jawa Barat cenderung rendah. Pada tahun 2020 UMP Jawa Barat berada diangka RP. 1.841.847 sedangkan UMP DKI Jakarta berada diangka RP. 4.416.186 (BPS, 2020).

Pengangguran juga mempunyai hubungan yang erat dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Standar hidup yang rendah, perumahan yang kurang layak, kesehatan yang buruk, dan pendidikan yang bisa dikatakan minim atau bahkan tidak sama sekali memberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan sangat rendah. Selalu ada hubungan antara pengangguran dan kemiskinan. Karena pada masyarakat yang menganggur, mereka tidak mempunyai penghasilan atau pendapatan yang tentunya ini akan berdampak dan berpengaruh pada kemiskinan.

Tingginya tingkat pertumbuhan angkatan kerja dengan pertumbuhan lapangan kerja atau kesempatan kerja yang relatif lambat membuat masalah pengangguran di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menjadi semakin serius. Semakin tinggi kemiskinan akan mempengaruhi adanya kesenjangan

antara jumlah para pencari kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada yang akan membuat tingkat pengangguran semakin tinggi.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, kemudian struktur lapangan kerja yang tidak seimbang, serta kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang.

Menurut Dr. Telisa A.F (2019) pengangguran merupakan orang-orang yang termasuk kadalam golongan angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan akan tetapi belum bisa memperolehnya. Tujuan akhir dari pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Jika tingkat pengangguran disuatu negara, wilayah atau daerah cenderung tinggi tentunya hal tersebut akan menghambat tujuan dari pencapaian pembangunan ekonomi yang telah dibuat tersebut. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), besarnya nilai TPT memberikan gambaran mengenai penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori pengangguran.

Tabel 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021

JAWA BARAT	TPT (%)		
	2019	2020	2021
Bogor	9.11	14.29	12.22
Sukabumi	8.05	9.60	9.51
Cianjur	9.81	11.05	9.32
Bandung	5.51	8.58	8.32
Garut	7.35	8.95	8.68
Tasikmalaya	6.31	7.12	6.16
Ciamis	5.16	5.66	5.06
Kuningan	9.68	11.22	11.68
Cirebon	10.35	11.52	10.38
Majalengka	4.37	5.84	5.71
Sumedang	7.70	9.89	9.18
Indramayu	8.35	9.21	8.3
Subang	8.68	9.48	9.77
Purwakarta	9.73	11.07	10.7
Karawang	9.68	11.52	11.83
Bekasi	9.00	11.54	10.09
Bandung Barat	8.24	12.25	11.65
Pangandaran	4.52	5.08	3.25
Kota Bogor	9.16	12.68	11.79
Kota Sukabumi	8.49	12.17	10.78
Kota Bandung	8.18	11.19	11.46
Kota Cirebon	9.04	10.97	10.53
Kota Bekasi	8.30	10.68	10.88
Kota Depok	6.12	9.87	9.76
Kota Cimahi	8.09	13.30	13.07
Kota Tasikmalaya	6.78	7.99	7.66
Kota Banjar	6.16	6.73	6.09

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat

Pada informasi tabel 1.3 di atas, memberikan informasi bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kabupaten/kota di Jawa Barat masih tergolong tinggi, dimana rata-rata tingkat pengangguran terbuka berada diatas 10%. Kurangnya lapangan pekerjaan yang ada tidak sebanding dengan jumlah para pencari kerja, hal ini bila terus menerus terjadi maka akan menciptakan tingginya

tingkat pengangguran terbuka (TPT). Semakin tingginya tingkat pengangguran akan mempengaruhi turunya standar kehidupan, apabila kondisi ini terus terjadi akan menghambat pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah tersebut.

Pada tahun 2021 TPT Jawa Barat mengalami fluktuasi yang signifikan. Tercatat beberapa kabupaten/kota yang memiliki nilai TPT melebihi TPT Jawa Barat yaitu diantaranya Kabupaten Bogor, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi dan Kota Cimahi. Hal ini menggambarkan bahwa rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang tersedia memicu adanya tingkat pengangguran yang tinggi. Hal ini dikarenakan tidak sebandingnya lapangan pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, sehingga pengangguran dimana-mana yang akan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan.

Kualitas sumber daya manusia juga bisa menjadi faktor penyebab adanya kemiskinan. Semakin rendahnya indeks kualitas hidup atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja dari penduduk. IPM merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu meliputi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak (BPS, 2016).

Menurut Todaro dan Smith (2006) pendapatan yang rendah dan standar hidup yang buruk yang dialami oleh golongan miskin, dapat menurunkan produktivitas ekonomi mereka dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi

lambat. Ketika produktivitas kerja menurun atau rendah akan memicu rendahnya perolehan pendapatan yang diterima. Semakin bagus tingkat kesehatan tenaga kerja, pengetahuan yang mumpuni, hidup yang layak akan mempengaruhi produktivitas kerja sehingga hasil kerja akan meningkat dan berkualitas. Berikut merupakan perkembangan mengenai kualitas sumber daya manusia pada wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat yang diukur dengan IPM.

Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021

JAWA BARAT	IPM (%)		
	2019	2020	2021
Bogor	69.69	70.40	70.60
Sukabumi	66.05	66.88	67.07
Cianjur	64.62	65.36	65.56
Bandung	71.75	72.39	72.73
Garut	65.42	66.12	66.45
Tasikmalaya	65.00	65.67	65.90
Ciamis	69.63	70.49	70.93
Kuningan	68.55	69.38	69.71
Cirebon	68.05	68.75	69.12
Majalengka	66.72	67.59	67.81
Sumedang	70.99	71.64	71.80
Indramayu	66.36	67.29	67.64
Subang	68.31	68.95	69.13
Purwakarta	69.98	70.82	70.98
Karawang	69.89	70.66	70.94
Bekasi	73.49	74.07	74.45
Bandung Barat	67.46	68.08	68.29
Pangandaran	67.44	68.06	68.28
Kota Bogor	75.66	76.11	76.59
Kota Sukabumi	73.55	74.21	74.60
Kota Bandung	81.06	81.51	81.96
Kota Cirebon	74.35	74.89	75.25
Kota Bekasi	81.04	81.50	81.95
Kota Depok	80.29	80.97	81.37
Kota Cimahi	77.56	77.83	78.06
Kota Tasikmalaya	72.03	73.04	73.31
Kota Banjar	71.25	71.70	71.92

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat

Mengingat bahwa IPM merupakan salah satu faktor pada kemiskinan karena pembangunan nasional dapat dikategorikan berhasil atau tidak, tidak hanya dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan tetapi dilihat dari berhasilnya pembangunan manusia. Hal demikian juga yang menyebabkan mengapa penduduk miskin tercipta, tentunya faktor terjadinya penduduk miskin dikarenakan adanya kualitas sumber daya manusia yang rendah.

Kualitas sumber daya manusia dapat diukur dari IPM. Buruknya kualitas IPM akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja yang dihasilkan, sehingga pendapatan yang diterima akan rendah. Sehingga dengan rendahnya pendapatan yang diterima menyebabkan semakin tingginya angka jumlah penduduk miskin.

Pada tabel 1.4 di atas terlihat bahwa IPM di kabupaten/kota di Jawa barat masih belum merata terbukti dengan adanya beberapa kabupaten/kota yang memiliki nilai IPM di bawah IPM Jawa Barat. Pada tahun 2021 IPM Jawa Barat sebesar 72,45% (Persen) mengalahkan IPM Indonesia yang berada diangka 72.29 (BPS, 2021). Akan tetapi di kabupaten/kota di Jawa Barat masih memiliki nilai IPM di bawah 72,45% yaitu diantaranya Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Pangandaran.

Selain IPM yang menjadi faktor kemiskinan lainnya yaitu pendapatan asli daerah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMN, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. Menurut

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tujuan dari PAD yaitu untuk memeberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah atas wujud desentralisasi.

Setiap daerah dibebankan untuk dapat mengelola dan meningkatkan PAD nya agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Suatu daerah dapat dikatakan mampu berotonomi atau mengatur sendiri kepentingannya dilihat dari kemampuan daerah tersebut untuk mengelola rumah tangganya dengan mengandalkan kemampuan daerah di daerah tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa alokasi belanja daerah memegang peranan penting dalam hal peningkatan penerimaan daerah. Besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh daerah baik dari dana perimbangan maupun pendapatan asli daerah maka daerah tersebut mampu melaksanakan pembangunannya masing-masing. Pendapatan asli daerah diperlukan untuk mengatasi kemiskinan. Hal ini karena masyarakat dengan pendapatan per kapita di bawah garis kemiskinan yang membutuhkan dana atau modal dapat dibantu melalui adanya pendapatan asli daerah.

Tabel 1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021

JAWA BARAT	PAD (Ribu Rupiah)		
	2019	2020	2021
Bogor	3.161.165.916	2.292.879.501	3.752.541.225
Sukabumi	619.788.613	636.807.441	1.243.115.254
Cianjur	628.558.762	709.817.068	738.222.744
Bandung	1.025.354.253	1.006.599.910	1.215.546.421
Garut	467.794.122	2.289.005.215	502.251.835
Tasikmalaya	288.290.679	265.290.679	400.221.000
Ciamis	264.280.368	252.715.071	251.612.581
Kuningan	768.999.420	323.447.628	395.251.210
Cirebon	633.229.949	644.500.671	710.254.126
Majalengka	439.843.265	549.202.000	559.678.000
Sumedang	463.528.449	553.370.845	884.510.545
Indramayu	450.063.254	433.556.780	425.345.164
Subang	463.310.454	544.773.087	570.068.999
Purwakarta	420.353.734	537.244.348	690.841.547
Karawang	1.356.345.658	900.148.620	960.174.773
Bekasi	2.439.368.558	2.267.432.436	399.954.458
Bandung Barat	528.017.654	405.525.915	644.474.574
Pangandaran	114.813.035	249.704.900	114.874.569
Kota Bogor	1.015.884.217	1.083.412.298	2.520.984.907
Kota Sukabumi	330.946.584	389.267.788	1.243.884.744
Kota Bandung	2.548.258.990	3.339.363.516	3.539.725.326
Kota Cirebon	434.207.968	520.061.006	516.921.154
Kota Bekasi	2.338.000.484	3.024.528.694	4.328.542.077
Kota Depok	1.293.003.769	1.269.422.761	375.835.739
Kota Cimahi	360.955.331	326.222.172	297.610.266
Kota Tasikmalaya	290.507.826	298.507.826	306.215.321
Kota Banjar	100.745.347	135.602.423	126.984.100

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan tabel 1.5 di atas, pada tahun 2021 rata-rata PAD Jawa Barat sebesar Rp. 1.019.234.471 Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kota Cimahi dan Kota Banjar merupakan wilayah yang memiliki nilai PAD jauh di bawah rata-rata PAD Jawa Barat. Kota Banjar menjadi

kota dengan PAD paling rendah yaitu sebesar Rp. 126.984.100 sedangkan Kab. Bogor menjadi kota dengan PAD paling tinggi yaitu sebesar Rp. 3.752.541.225.

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis akan mengambil judul penelitian **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2010-2021”**

1.2. Rumusan Masalah

Dalam Penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana Pengaruh UMK, TPT, IPM dan PAD, terhadap Tingkat Kemiskinan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, pada penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan Tingkat Kemiskinan, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat.
2. Mengetahui pengaruh UMK, TPT, IPM dan PAD, terhadap Tingkat Kemiskinan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar hasil yang diperoleh dari penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk dijadikan sumber informasi bagi para peneliti dan akademisi yang akan melakukan penelitian sehingga dapat menjadi masukan bagi pengembangan khususnya ilmu ekonomi makro, dan ilmu ekonomi pembangunan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pengambil kebijakan.

Sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kota, dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal mengambil kebijakan tentang upah minimum kabupaten/kota, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, PDRB Perkapita terhadap penanggulangan penduduk miskin di Jawa Barat.

b. Bagi masyarakat.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan motivasi dan informasi kepada masyarakat untuk keluar dari kemiskinan.

c. Bagi penulis.

Diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan serta sebagai latihan dalam melakukan penelitian juga sebagai syarat dalam memperoleh gelar S1 Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang memiliki hubungan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas, yaitu mengenai kemiskinan, upah minimum kabupaten/kota, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan pendapatan asli daerah. Pada penelitian ini memiliki *grand theory* atau teori utama yaitu sebagai berikut:

1. Teori Paradigma Sosial Demokrat

Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan adalah masalah struktural. Hal ini disebabkan karena adanya ketimpangan pendapatan di masyarakat yang menyebabkan terbatasnya akses kelompok tertentu terhadap beberapa sumber kemasyarakatan. Pada teori ini menganggap bahwa kesetaraan adalah syarat dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan. Tercapainya kebebasan terjadi ketika setiap individu mampu menjangkau pendidikan yang tinggi, kesehatan yang layak dan pendapatan yang cukup. Dengan kata lain makna kebebasan pada teori ini yaitu memiliki kemampuan. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, menghindari kematian dini, menghindari kekurangan gizi, memiliki kemampuan membaca, menulis dan berkomunikasi.

2.2. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan seseorang yang tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Masyarakat yang berada didalam kemiskinan hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan sumber daya yang terbatas.

Informasi kemiskinan diperlukan sebagai alat bagi pengambil kebijakan untuk menilai keberhasilan program-program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Menurut Todaro dalam Bappenas (2018) tinggi dan meluasnya kemiskinan merupakan pokok pada semua masalah pembangunan.

Tingkat kemiskinan merupakan indikator untuk menggambarkan bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan merupakan cerminan dari tingkat kemiskinan.

2.2.1 Pengertian Kemiskinan

Terdapat dua jenis kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Sedangkan kemiskinan relatif merupakan kondisi yang disebabkan oleh tidak meratanya kebijakan pembangunan dan distribusi pendapatan kepada seluruh lapisan masyarakat. (Bappenas, 2018). Hal ini didukung dengan pendapat Todaro (2006) tinggi rendahnya tingkat kemiskinan berfokus kepada dua hal yaitu: tingkat pendapatan rata-rata, dan kesenjangan distribusi pendapatan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan dapat diukur dengan menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka kemiskinan dapat diartikan dengan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang berasal dari segi pengeluaran. Penduduk dengan pengeluaran bulanan rata-rata sesuai dengan kapita di bawah garis kemiskinan disebut dengan jumlah penduduk miskin. Garis Kemiskinan (GK) menggambarkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan seseorang untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok non-makanan. (BPS)

GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). GKM menggambarkan nilai rupiah pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Sedangkan GKNM menggambarkan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan. Kebutuhan tersebut berupa kebutuhan akan perumahan, sandang serta pendidikan dan kesehatan. GK memiliki rumus perhitungan sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Keterangan:

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non-Makanan

2.2.2 Indikator Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat beberapa indikator dalam mengukur kemiskinan antara lain :

1. *Head Count Index* (HCI – P0) adalah presentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* P1) yaitu merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* P2) yaitu adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka akan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

2.2.3 Penyebab Terjadinya Kemiskinan

Menurut Kuncoro mengatakan bahwa ada 3 (tiga) faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan antara lain;

1. Secara makro kemiskinan terjadi karena adanya distribusi pendapatan yang tidak merata.
2. Kemiskinan terjadi karena adanya perbedaan pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Rendahnya kualitas SDM mencerminkan rendahnya produktivitas maka, pendapatan yang diterima akan rendah. Rendahnya kualitas SDM diakibatkan oleh kurangnya keahlian yang dimiliki serta rendahnya tingkat pendidikan yang ditempuh dikalangan penduduk miskin.

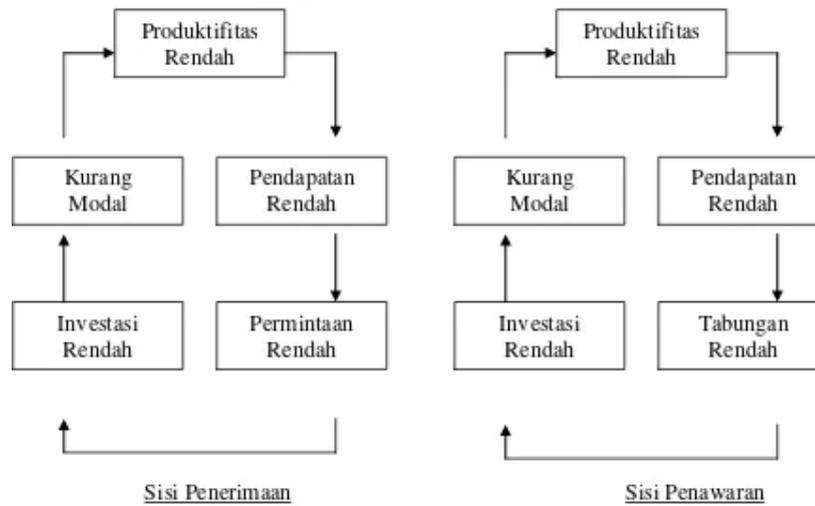
3. Kemiskinan terjadi karena adanya perbedaan pada akses modal.

2.2.4 Teori Lingkaran Perangkap Kemiskinan

Lingkaran perangkap kemiskinan merupakan rangkaian kekuatan-kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Hal ini menimbulkan keadaan suatu negara akan tetap miskin dan mengalami kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Terdapat dua lingkaran kemiskinan yang menghalangi negara berkembang untuk mencapai tujuan dari cepatnya pembangunan di negara tersebut. Dua lingkaran kemiskinan tersebut yaitu dari segi penawaran modal dan segi permintaan modal.

Lingkaran perangkap kemiskinan dari segi penawaran modal yaitu ketika tingkat pendapatan masyarakat rendah yang disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas menyebabkan rendahnya kemampuan masyarakat untuk menabung. Jika tabungan rendah maka tingkat pembentukan modal pun akan rendah. Sehingga suatu negara akan mengalami kekurangan barang modal dengan demikian akan memicu rendahnya tingkat produktivitas.

Lingkaran perangkap kemiskinan dari segi permintaan modal yaitu ketika negara miskin mengalami kekurangan atau rendahnya penanaman modal. Sehingga menyebabkan adanya keterbatasan pasar yang disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang rendah. Hal tersebut menggambarkan bahwa pembentukan modal yang terbatas menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat karena produktivitas yang rendah.



Gambar 2.1 Lingkaran Perangkap Kemiskinan

Sumber: Mudrajat Kuncoro

Selain dua lingkaran perangkap kemiskinan Nurkse dan Baldwin mengemukakan lingkaran perangkap kemiskinan yang timbul dari hubungan antara masyarakat terbelakang dan tradisional dengan kekayaan alam yang belum dimanfaatkan secara efektif. Pemanfaatan kekayaan alam harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian untuk memimpin dan melakukan tugas apapun pada kegiatan perekonomian. Di negara berkembang kekayaan alam belum sepenuhnya digunakan secara efektif dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat tersebut. Akibatnya pembangunan manusia di negara berkembang masih tergolong rendah.

2.3 Pengertian Upah

Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) upah merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja

kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menurut Sumarsono S (2003) upah merupakan penerimaan imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukan dan dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan yang dibayarkan atas persetujuan tersebut yang meliputi tunjangan. Menurut UU No.13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan mengatakan bahwa upah merupakan hak pekerja/buruh yang harus diberikan dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas atau imbalan terhadap jasa dan tenaga yang dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah merupakan pendapatan yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ada beberapa faktor yang dapat menentukan besarnya penetapan upah yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah permintaan tenaga kerja. Tingginya permintaan tenaga kerja dapat mempengaruhi besarnya upah yang akan diterima. Hal ini disebabkan ketika permintaan tenaga kerja lebih tinggi dari jumlah pencari kerja maka, upah yang akan dikeluarkan pun tinggi karena kurangnya tenaga kerja.

2. Jumlah penawaran tenaga kerja. Ketika jumlah tenaga kerja lebih tinggi dari lowongan pekerjaan maka, upah yang dikeluarkan pun akan rendah. Hal ini disebabkan karena jumlah pencari kerja melebihi kapasitas lowongan pekerjaan yang ditawarkan.
3. Kemampuan tenaga kerja. Tingginya upah dapat ditentukan ketika seseorang memiliki kemampuan yang mumpuni. Hal ini disebabkan karena kemampuan atau keahlian seseorang dapat mempengaruhi produktivitas kerja maka, upah yang dikeluarkan pun akan tinggi.
4. Masa kerja atau pengalaman kerja. Semakin lama masa kerja dan berpengalaman akan menentukan besarnya upah yang akan diterima. Hal ini disebabkan karena seseorang yang memiliki masa kerja yang lama menggambarkan kontribusi dan kesetiaan terhadap perusahaan atau tempat dimana dia bekerja.

Tingkat upah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pernikahan, jabatan, lokasi bekerja, status pekerjaan, umur dan pengalaman. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat upah yaitu sebagai berikut:

1. Jam kerja. Para pekerja mendapatkan upah atas waktu yang mereka habiskan untuk mendapatkan barang dan jasa.
2. Pengalaman kerja. Peningkatan upah didapatkan apabila pekerja memiliki riwayat pekerjaan sebelumnya yang mumpuni.
3. Tingkat pendidikan. Perusahaan atau produsen cenderung memberikan upah yang besar kepada pekerja yang memiliki riwayat pendidikan yang tinggi.

4. Jenis pekerjaan. Dibagi kedalam dua jenis yaitu pekerja terampil dan pekerja professional.

2.3.1 Pengertian Upah Minimum Kabupaten/Kota

Menurut Pasal 10 Ayat 3 Permenaker bahwa nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) harus lebih besar dari pada nilai Upah Minimum Provinsi dan jika pada satu kabupaten/kota sudah ditetapkan peraturan mengenai UMK maka yang berlaku adalah ketentuan UMK. Nilai UMK didapatkan dari upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestic bruto tahun berjalan.

Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan sebagai sebagai upaya untuk mewujudkan hak pekerja untuk memperoleh penghasilan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang layak. Kebijakan upah minimum berdampak kepada seluruh distribusi upah, harga, penyerapan tenaga kerja serta iklim usaha. Upah minimum berlaku selama satu tahun dan merupakan upah bulanan terendah yang diterima semua jenis status buruh. Penetapan upah minimum bertujuan sebagai jaringan pengaman yang berfungsi guna mencegah agar upah tidak mengalami penurunan di bawah daya beli pekerja.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) upah minimum merupakan upah terendah yang diberikan kepada karyawan/pekerja/buruh yang meliputi tunjangan. Upah minimum ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) bersama Lembaga Tripartit Nasional dan Lembaga Tripartit Daerah. Upah merupakan faktor yang dapat mendorong produktivitas pekerja.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1999 mengatakan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atau Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk. II) merupakan upah minimum yang berlaku di kabupaten/kotamadya. Upah harus diatur dengan baik dan tepat sasaran untuk mampu memenuhi kebutuhan para pekerja atau buruh. Jika nilai upah terlalu tinggi akan menyebabkan harga produk menjadi mahal. Akan tetapi ketika nilai upah rendah maka akan membuat produktivitas tenaga kerja menurun akibatnya produksi menjadi tidak efisien. Melalui Gubernur mengenai kebijakan penetapan upah, pemerintah mengeluarkan kebijakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang hanya berlaku di tingkat kabupaten/kota. UMK merupakan bulanan terendah yang diberikan atas upah pokok dan tunjangan tetap.

Perhitungan UMK dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota yang selanjutnya diberikan kepada bupati/walikota yang nantinya diusulkan kepada gubernur.

UMK ditetapkan dengan mempertimbangkan:

1. Kebutuhan.
2. Indeks Harga Konsumen (IHK).
3. Kemampuan, perkembangan dan keberlangsungan perusahaan.
4. Upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu.
5. Kondisi pasar kerja.
6. Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita.
5. kedalam dua jenis yaitu pekerja terampil dan pekerja professional.

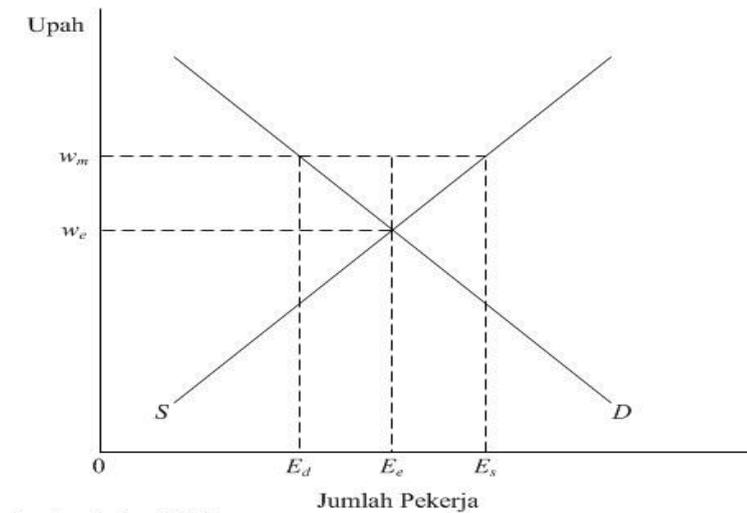
2.3.2 Teori Upah Minimum

Tingkat upah minimum yang dikemukakan dalam teori upah efisiensi bertujuan sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pada teori upah efisiensi (*Efficiency-wage*) dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja karena adanya beberapa alasan sebagai berikut:

1. Upah dapat mempengaruhi nutrisi para pekerja. Upah yang cukup dan layak membuat mereka lebih mudah mendapatkan nutrisi untuk mencapai hidup yang sehat dan lebih baik. Tentunya ini akan berdampak pada produktivitas tenaga kerja yang dihasilkan.
2. Rata-rata kualitas para tenaga kerja bergantung pada upah yang diterima. Semakin tinggi upah yang diterima maka produktivitas tenaga kerja akan meningkat. Sedangkan rendahnya upah yang diterima membuat para tenaga kerja dengan mudahnya beralih ke perusahaan yang mampu memberikan upah yang lebih tinggi.
3. Upah yang besar dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Besarnya upah dapat menjadi rangsangan atau dorongan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
4. Tingginya upah dapat mengurangi perputaran tenaga kerja. Besarnya upah membuat para pekerja tidak dengan gampang beralih ke perusahaan lain yang menjanjikan upah yang lebih besar.

Kebijakan upah minimum (*complete coverage*) dapat melindungi semua sektor perekonomian. Hal ini disebut dengan pasar tenaga kerja kompetitif. Penetapan upah minimum dapat mengurangi tenaga kerja dan meningkatkan pengangguran. Peningkatan pengangguran berasal dari pekerja yang mengalami

pemutusan hubungan kerja dan pencari kerja. Upah minimum memberikan dampak dalam pasar tenaga kerja kompetitif yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.2 Upah

Pada gambar 2.2 kondisi awal jumlah pekerja yang dipekerjakan sebesar E_e , dengan tingkat upah w_e . Pemerintah kemudian menetapkan upah minimum sebesar w_m . Penetapan upah minimum mengakibatkan jumlah pekerja yang bekerja mengalami penurunan sebesar $E_e - E_d$. Sementara itu, jumlah pencari kerja yang tidak memperoleh pekerjaan mengalami peningkatan sebesar $E_s - E_e$. Dengan demikian, penetapan upah minimum di atas upah ekulibrium pada kondisi *complete coverage*, akan menimbulkan pengangguran.

Penetapan upah minimum diperoleh dari upah minimum tahun berjalan ditambah hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat produk domestik bruto tahun berjalan dengan rumus sebagai berikut:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi}_t + \% \Delta PDB_t)\}$$

Keterangan:

UMn = Upah Minimum Yang Akan Ditetapkan

UMt = Upah Minimum Tahun Berjalan

Inflasi = Inflasi Provinsi

Δ PDBt = Pertumbuhan Ekonomi

2.4 Pengertian Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengangguran merupakan penduduk yang termasuk kedalam angkatan kerja (penduduk usia kerja 15 tahun ke atas) yang sedang aktif mencari pekerjaan. Menurut Sumarsono (2009) pengangguran merupakan orang yang selama kurang dari dua hari seminggu tidak bekerja atau bahkan sama sekali tidak bekerja. Hal ini didukung dengan pendapat Sukirno (1994) pengangguran merupakan tenaga kerja yang secara aktif mencari pekerjaan akan tetapi tidak ada satupun pekerjaan yang diperolehnya.

Tingginya tingkat pengangguran menggambarkan bahwa penduduk di suatu wilayah/daerah hanya menjadi seorang konsumen tanpa menjadi faktor produksi yang dapat menghasilkan output. Menganggur atau menjadi pengangguran akan membuat mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak adanya penghasilan yang diperoleh. Pengangguran memberikan dampak buruk terhadap kesejahteraan seseorang karena mengurai pendapatan mereka. (Sadono, 2004).

Pengangguran dibedakan menjadi tiga jenis (Dr Telisa,2019) antara lain:

1. Pengangguran Terselubung (Disguised Unemployment) merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena adanya suatu alasan tertentu.
2. Setengah Menganggur (Under Unemployment) merupakan.
3. Pengangguran Terbuka (Open Underemployment) merupakan tenaga kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan.

2.4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang termasuk kedalam angkatan kerja ialah penduduk usia kerja yang berusia 15 tahun ke atas.

TPT dapat digunakan untuk melihat seberapa besar indikasi persentase angkatan kerja yang termasuk kedalam pengangguran. Tingginya nilai TPT mengindikasikan bahwa tidak termanfaatkannya persediaan tenaga kerja yang ada. (BPS, 2022). TPT dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TPT = PP / PPAK \times 100\%$$

Keterangan:

TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

PP : Jumlah Pengangguran (orang)

PPAK : Jumlah Angkatan Kerja (orang)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengangguran merupakan penduduk yang termasuk kedalam angkatan kerja (penduduk usia kerja 15 tahun ke atas)

yang sedang aktif mencari pekerjaan. Menurut Sumarsono (2009) pengangguran merupakan orang yang selama kurang dari dua hari seminggu tidak bekerja atau bahkan sama sekali tidak bekerja. Hal ini didukung dengan pendapat Sukirno (1994) pengangguran merupakan tenaga kerja yang secara aktif mencari pekerjaan akan tetapi tidak ada satupun pekerjaan yang diperolehnya.

Tingginya tingkat pengangguran menggambarkan bahwa penduduk di suatu wilayah/daerah hanya menjadi seorang konsumen tanpa menjadi faktor produksi yang dapat menghasilkan output. Menganggur atau menjadi pengangguran akan membuat mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak adanya penghasilan yang diperoleh. Pengangguran memberikan dampak buruk terhadap kesejahteraan seseorang karena mengurai pendapatan mereka. (Sadono, 2004).

Pengangguran dibedakan menjadi tiga jenis (Dr Telisa,2019) antara lain:

1. Pengangguran Terselubung (*Disguised Unemployment*) merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena adanya suatu alasan tertentu.
2. Setengah Menganggur (*Under Unemployment*) merupakan.
3. Pengangguran Terbuka (*Open Underemployment*) merupakan tenaga kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan.

2.4.2 Penyebab Pengangguran

Menurut Sukidjo (2005) penyebab adanya pengangguran yaitu sebagai berikut:

1. Adanya keterbatasan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Banyaknya pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang ada sehingga penyerapan tenaga kerja tidak maksimal.

2. Adanya keterbatasan keahlian yang dikuasai oleh pencari kerja. Pencari kerja yang tidak memiliki keahlian atau kemampuan yang diperlukan oleh perusahaan.
3. terbatasnya informasi sehingga pencari kerja tidak mengetahui informasi mengenai perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
4. tidak meratanya lapangan pekerjaan yang tersedia. Umumnya lapangan pekerjaan banyak tersedia di daerah perkotaan.
5. kurangnya upaya pemerintah dalam penyediaan pelatihan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau keahlian pencari kerja.

2.4.3 Teori Pengangguran Keynes

Keynes berpendapat bahwa campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan selama perekonomian diatur oleh kegiatan dipasar bebas yang akan berdampak pada kesempatan kerja. Penggunaan tenaga kerja pada sistem pasar bebas tidak selalu berjalan mulus, perlu adanya kebijakan atau campur tangan pemerintah.

Menurut Keynes ketidakmampuan produsen dalam menyerap tenaga kerja dikarenakan adanya penurunan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Ketika persediaan tenaga kerja terus meningkat dan tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan memaksa produsen memangkas upah pekerja. Akibatnya produsen merugi dan tidak mampu untuk menyerap tenaga kerja. Upah yang tidak fleksibel, pengeluaran menurun menyebabkan penurunan produksi dan PHK pekerja. (Keynes dalam Ismail, 2012).

2.4.4 Dampak Pengangguran

Dr Telisa mengelompokkan dampak pengangguran kedalam 2 kelompok yaitu sebagai berikut:

- a. Dampak Pengangguran terhadap perekonomian suatu negara
 1. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang diperolehnya.
 2. Pengangguran menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang.
 3. Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi.
- b. Dampak pengangguran terhadap masyarakat
 1. Pengangguran menghilangkan mata pencaharian.
 2. Pengangguran menghilangkan keterampilan.
 3. Pengangguran menimbulkan ketidakstabilan sosial politik.

2.5 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1990. Pembangunan suatu negara dikatakan berhasil atau tidak dapat dilihat salah satunya melalui IPM. IPM menjelaskan tiga dimensi dalam pembangunan manusia yaitu peluang hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), serta standar hidup layak (decent living standard).

IPM merupakan indikator untuk mengukur perbandingan harapan hidup, pendidikan, serta standar hidup. IPM juga dapat berguna untuk mengkategorikan apakah suatu negara termasuk ke dalam negara maju, negara berkembang, serta negara terbelakang. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) IPM merupakan sebuah ukuran capaian pembangunan manusia yang berbasis pada komponen dasar kualitas hidup.

Menurut BPS manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Manusia merupakan tujuan akhir dari sebuah pembangunan bukan sekedar alat

pembangunan. Menurut UNDP tujuan utama pembangunan yaitu terciptanya lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk dapat menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Syarat penting berlangsungnya pembangunan ekonomi yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Ketika suatu negara melakukan pembangunan ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan peningkatan IPM sangat dibutuhkan guna peningkatan kualitas SDM. Dengan demikian IPM berperan penting untuk peningkatan kualitas SDM guna mencapai pembangunan ekonomi jangka panjang dan berkesinambungan.

Ada tiga kriteria yang dinilai berdasarkan ketahanan hidup, pengetahuan serta harapan hidup pada saat kelahiran mampu mengelompokkan suatu negara ke dalam tiga kelompok. Jika nilai IPM nya berada di angka 0,00 - 0,50 artinya tingkat pembangunan manusianya rendah. Ketika nilai IPM nya sebesar 0,50 – 0,79 maka pembangunan manusianya sedang. Sedangkan jika nilai IPM nya berada di angka 0,80 – 1.00 artinya pembangunan manusianya tinggi.

Untuk menghitung IPM dapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPM = \frac{1}{3} (X1 + X2 + X3)$$

Keterangan:

X1 = Indeks Harapan Hidup

X2 = Indeks Pendidikan (2/3 Indeks Melek Huruf + 1/3 Indeks Rata-Rata Lama Sekolah

X3 = Indeks Standar Hidup Layak

2.5.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator kunci untuk melihat sisi lain dari pembangunan. IPM dapat menjelaskan bagaimana masyarakat mengakses hasil pembangunan dalam bentuk pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan aspek kehidupan lainnya.

United Nations Development Program (UNDP) mengelompokkan suatu negara kedalam peringkat yang menggambarkan tinggi rendahnya tingkat pembangunan manusia di negara tersebut. Peringkat dimulai dari skala 0 hingga 1 yang dimana angka 0 menggambarkan tingkat pembangunan manusia yang paling rendah. Sedangkan untuk peringkat 1 menggambarkan tingkat pembangunan manusia yang tertinggi.

Menurut Todaro (2006) terdapat tiga produk akhir pada pembangunan manusia yaitu sebagai berikut: masa hidup yang diukur melalui usia harapan hidup, pengetahuan yang diukur melalui kemampuan membaca dan menulis, serta standar hidup yang layak yang diukur melalui pendapatan riil perkapita.

2.5.2 Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam perhitungan IPM menurut Badan Pusat Statistika (BPS, 2020) yaitu sebagai berikut:

1. Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Indikator UHH merupakan cara penting untuk dapat melihat derajat kesehatan suatu masyarakat yang dilihat dari meningkatnya umur harapan hidup, turunnya angka kematian bayi, ibu dan anak dan juga turunnya angka kesakitan dan angka kecacatan serta peningkatan status gizi masyarakat,

2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Indikator RLS menggambarkan stok yang terjadi pada dunia pendidikan. Cakupan penduduk yang dihitung berusia 25 tahun keatas. Menurut UNDP penduduk berusia 25 tahun ke atas merupakan stok pendidikan yang dimiliki oleh suatu wilayah. Umumnya penduduk berusia 25 tahun keatas tidak bersekolah lagi.
3. Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS digunakan guna mengetahui kondisi pembangunan system pendidikan di berbagai jenjang pendidikan. HLS merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan nantinya akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun ke atas di masa mendatang.
4. Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Indikator PNB perkapita menggambarkan kesejahteraan masyarakat.

2.5.3 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Menurut BPS, IPM memiliki manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Suksesnya pembangunan ekonomi di suatu negara tercermin pada peningkatan IPM. Karena IPM merupakan syarat untuk meningkatnya kualitas hidup manusia.
2. IPM dapat menentukan peringkat pembangunan suatu wilayah/negara. Capaian pembangunan manusia di suatau wilayah dikelompokkan pada 4 kelompok yaitu:
 - 1) Kelompok “Sangat Tinggi”: $IPM \geq 80$
 - 2) Kelompok “Tinggi”: $70 \leq IPM < 80$
 - 3) Kelompok “Sedang”: $60 \leq IPM < 70$
 - 4) Kelompok “Rendah”: $IPM < 60$

3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis yang digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Setiap tahun IPM dihitung guna pemenuhan kebutuhan Kementerian Keuangan dalam menghitung DAU.

2.6 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan asli daerah yang digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. PAD bertujuan untuk memberikan kekuasaan terhadap pemerintah daerah perihal pendanaan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi di daerah tersebut atas wujud desentralisasi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah yang meliputi dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba

BUMD, penerimaan dari dinas-dinas, dan penerimaan lain-lain. Secara umum terdapat 2 (dua) cara untuk meningkatkan PAD agar mendekati nilai penerimaan potensialnya yaitu sebagai berikut:

1. Intensifikasi. Wujud intensifikasi untuk retribusi yaitu dengan menghitung potensi secara akurat untuk membuat target penerimaan dapat sesuai mendekati penerimaan potensialnya.
2. Ektensifikasi. Wujud ektensifikasi yaitu dengan cara melakukan penggalian akan sumber-sumber objek pajak atau dengan menjangkau wajib pajak baru.

PAD menjadi salah satu faktor dalam hal pelaksanaan pemerintah di suatu daerah yang berdasarkan kepada prinsip yang nyata dan lugas. PAD dapat

menjadi tolak ukur mengenai pelaksanaan wewenang atau kekuasaan daerah. Besarnya penerimaan PAD akan mempengaruhi besarnya ketersediaan jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan di daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang didapatkan dari sumber-sumber pada wilayah itu sendiri yang didapat melalui peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu indikator yang dapat menentukan apakah suatu daerah mampu untuk mengatur kepentingannya yaitu melalui PAD. Ketika suatu daerah memiliki penerimaan PAD yang besar dapat mempengaruhi kecilnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Hal ini karena PAD merupakan sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri. Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 18 bahwa PAD merupakan penerimaan yang didapatkan dari sumber-sumber pada wilayah itu sendiri yang didapat melalui peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang didapatkan dari sumber-sumber pada wilayah itu sendiri yang didapat melalui peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu indikator yang dapat menentukan apakah suatu daerah mampu untuk mengatur kepentingannya yaitu melalui PAD. Ketika suatu daerah memiliki penerimaan PAD yang besar dapat mempengaruhi kecilnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Hal ini karena PAD merupakan sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri. Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 18 bahwa PAD merupakan penerimaan yang

didapatkan dari sumber-sumber pada wilayah itu sendiri yang didapat melalui peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah sumber keuangan daerah yang didapatkan pada daerah tersebut yang meliputi:

1. Pajak daerah

Menurut Undang-Undang No. 34 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No.8 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah merupakan iuran wajib yang harus dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah mengenai pembangunan di daerah tersebut.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan sumber PAD yang memiliki peranan besar dalam pembentukan PAD. Retribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang didapatkan sebagai imbalan langsung maupun tidak langsung atas pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah

Sumber penerimaan PAD yang berperan terhadap pembentukan PAD yaitu atas laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hasil dari BUMD merupakan penerimaan daerah dari laba bersih perusahaan daerah. BUMD didirikan dengan tujuan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mampu mendukung pembangunan ekonomi di suatu daerah, mampu memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan menjadi sumber penerima daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 6 ayat 3 mengenai Lain-lain PAD yang sah meliputi:

1. Bagian laba perusahaan milik daerah.
2. Bagian laba lembaga keuangan bank.
3. Bagian laba lembaga keuangan non bank.
4. Bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibuat sebagai bahan untuk membandingkan hasil penelitian yang telah dikaji sebelumnya sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan dilakukan. Berikut pada penelitian terdahulu yang terdapat beberapa variabel yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai upah minimum kabupaten/kota, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, pdrb perkapita yang mempengaruhi kemiskinan. Adapun penelitian tersebut tertera pada tabel berikut

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan
1.	Shinta Setya Ningrum: 2017 "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks	Tujuan: Menguji dan menganalisis tingkat pengangguran terbuka, indeks	Tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan upah minimum	Persamaan: <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki variabel bebas yang sama yaitu TPT, IPM dan upah minimum

	Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2011-2015”.	pembangunan manusia, dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2011-2015. Variabel Bebas: TPT, IPM dan Upah Minimum Variabel Terikat: Jumlah penduduk miskin	menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan data sekunder • Menggunakan data panel Perbedaan: <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini tidak membahas mengenai PDRB perkapita. • Menggunakan data periode tahun 2011-2015.
2.	Erliza Millennia Putri, Dewi Zaini Putri: 2021 “Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap kemiskinan di Inonesia”.	Tujuan: Mengetahui dan menganalisis pengaruh upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, pendidikan dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Inonesia. Variabel Bebas: Upah minimum, TPT, pendidikan dan pengeluaran Variabel Terikat: kemiskinan	Upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, pendidikan berpengaruh positif, sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.	Persamaan: <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki variabel bebas yang sama yaitu tingkat pengangguran terbuka. • Menggunakan data sekunder Perbedaan: <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini tidak membahas mengenai PDRB perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia. • Menggunakan data periode tahun 2010-2019.
3.	Martadinata, Ahmad: 2017 “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Dan Upah	Tujuan: Untuk mengetahui besarnya dan pengaruh indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto per kapita dan upah minimum	IPM dan UM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, dan variabel PDRB per kapita berpengaruh positif dan tidak signifikan	Persamaan: <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan data sekunder • Memiliki variabel bebas yang sama. Perbedaan: <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini berfokus pada

	Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Lampung	kabupaten terhadap jumlah penduduk miskin Variabel Bebas: IPM, PDRB perkapita, upah minimum Variabel Terikat: Jumlah penduduk miskin	terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Lampung.	jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung. • Pada penelitian ini tidak membahas mengenai TPT.
4.	Dita Sekar Ayu: 2018 “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur (2010-2015)”	Tujuan: Untuk menganalisis pengaruh variabel independen Produk Domestik Regional bruto (PDRB), tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015. Variabel Bebas: PDRB, TPT, IPM, jumlah penduduk Variabel Terikat: Kemiskinan	Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh positif. Produk Domestik Regional bruto (PDRB), tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.	Persamaan: • Menggunakan data sekunder • Menganalisis pengaruh TPT, IPM terhadap kemiskinan Perbedaan: • Pada penelitian ini berfokus pada kemiskinan di Provinsi Jawa Timur • Pada penelitian ini menggunakan data periode 2010-2015.
5.	Agus Pande Darmawan, I Wayan Wenagama: 2017 “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendidikan	Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh secara serempak dan parsial PAD, pendidikan dan	Pendidikan dan pengangguran berpengaruh positif sedangkan PAD berpengaruh negatif terhadap	Persamaan: • Memiliki variabel bebas yang sama PAD dan pengangguran

	dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali”	pengangguran terhadap kemiskina di Provinsi Bali. Variabel Bebas: PAD, pendidikan dan pengangguran Variabel Terikat: Kemiskinan	kemiskinan di Provinsi Bali.	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan data sekunder Perbedaan: <ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitian ini berfokus pada kemiskinan di Provinsi Bali. • Menggunakan data periode 2001-2015.
6.	Yolanda Oktaviani, Indanazulfa Qurrota A’yun: 2021 “Analysis of the Effect of Unemployment Rate, Regional Minimum wage, and HDI on Poverty Rates in the Special Region of Yogyakarta”	Tujuan: Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran, upah minimum dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Bantul. Variabel Bebas: Tingkat pengangguran, upah minimum, IPM Variabel Terikat: Tingkat kemiskinan.	Tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Upah minimum regional, dan IPM sekaligus mempengaruhi tingkat kemiskinan.	Persamaan: <ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas yang sama yaitu tingkat pengangguran, upah minimum dan IPM. • Variabel terikat yang sama yaitu tingkat kemiskinan. Perbedaan: <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini berfokus pada kemiskinan di Bantul, Yogyakarta. • Menggunakan data perode 2015-2019.
7.	Rahayu, Y: 2018 “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pdrb Per Kapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah	Tujuan: Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara indeks pembangunan manusia, pdrb perkapita terhadap jumlah penduduk	Jumlah pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin. Indeks pembangunan manusia dan pdrb perkapita	. Persamaan: <ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas yang sama yaitu tingkat pengangguran, upah minimum dan IPM. • Variabel terikat yang sama yaitu

	Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi”	<p>miskin.</p> <p>Variabel Bebas: IPM, PDRB perkapita, jumlah Pengangguran</p> <p>Variabel Terikat: Jumlah penduduk miskin</p>	berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.	<p>tingkat kemiskinan.</p> <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini berfokus pada kemiskinan di Provinsi Jambi. • Menggunakan data periode tahun 2013-2016.
8.	Fahrika A.I., Salam. H, Buhasyim M.A: 2020 “Effect of Human Development Index (HDI), Unemployment, and Investment Realization toward Poverty in South Sulawesi-Indonesia”	<p>Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh IPM, Pengangguran dan Investasi terhadap kemiskinan.</p> <p>Variabel Bebas: IPM, Pengangguran, Investasi</p> <p>Variabel Terikat: Kemiskinan</p>	Ipm berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas yang sama yaitu IPM, pengangguran dan Investasi. • Variabel terikat yang sama yaitu tingkat kemiskinan. <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini berfokus pada kemiskinan di Sulawesi Selatan. • Menggunakan data periode tahun 2010-2018.
9.	Hidayatullah A., Arifin Z. Suliswanto Muhammad S.W : 2021 “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Wilayah Tapal Kuda Tahun 2012-2018.	<p>Tujuan: Untuk menganalisis pengaruh PDRB, IPM, dan Upah Minimum terhadap kemiskinan di Tapal Kuda.</p> <p>Variabel Bebas: Upah Minimum, PDRB, IPM</p> <p>Variabel Terikat: Kemiskinan</p>	PDRB dan IPM menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan upah minimum menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas yang sama yaitu Upah Minimum, PDRB, dan IPM. • Variabel terikat yang sama yaitu tingkat kemiskinan. <p>• Menggunakan data panel.</p> <p>Perbedaan:</p>

			kemiskinan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini berfokus pada kemiskinan di Wilayah Tapal Kuda. • Menggunakan data periode tahun 2012-2018.
10	Susanti S :2013. “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel”	<p>Variabel Bebas: PDRB, IPM, dan Pengangguran.</p> <p>Variabel Terikat: Kemiskinan</p>	PDRB, dan Pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Sedangkan IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Jawa Barat.	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas yang sama yaitu PDRB, dan IPM. • Variabel terikat yang sama yaitu tingkat kemiskinan. • Menggunakan data panel. <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan data periode tahun 2009-2011.

2.8 Kerangka Pemikiran

Pada kerangka pemikiran terdapat variabel bebas dan variabel terikat. Adapun untuk variabel bebasnya terdiri dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan PDRB Perkapita (PPK). Sedangkan untuk variabel terikatnya yaitu tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, pada teori yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini mencoba untuk menganalisis keterkaitan beberapa variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat.

Hubungan UMK terhadap kemiskinan. Terdapat hubungan yang negatif antara UMK dengan tingkat kemiskinan. Kenaikan UMK yang terjadi tiap

tahunnya mampu menurunkan kemiskinan. Tingginya UMK dapat memicu penurunan penduduk miskin. Hal ini dikarenakan pendapatan yang diterima mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sesuai dengan tujuan penetapan upah minimum yaitu upah minimum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sehingga bias keluar dari garis kemiskinan. Jika UMK meningkat maka tingkat kemiskinan akan menurun. Begitupun sebaliknya jika UMK menurun maka tingkat kemiskinan akan meningkat.

Hubungan TPT terhadap tingkat kemiskinan. Terdapat hubungan yang positif antara TPT dengan tingkat kemiskinan. Pengangguran dapat mengurangi pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang menganggur. Berkurang atau rendahnya pendapatan dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Hal ini didukung oleh pendapat Sadono (2004) pengangguran memberikan dampak buruk terhadap kesejahteraan seseorang karena adanya pendapatan yang berkurang. Turunnya kesejahteraan seseorang karena menganggur membuat sulit untuk merek keluar dari kemiskinan. Jika pengangguran mengalami kenaikan, maka kesejahteraan masyarakat yang menganggur turun yang diikuti dengan turunnya pendapatan yang diterima. Hal ini menyebabkan tingkat kemiskinan mengalami kenaikan. Sebaliknya jika pengangguran turun maka kesejahteraan masyarakat yang menganggur naik yang diikuti dengan naiknya pendapatan yang diterima sehingga tingkat kemiskinan turun.

Hubungan IPM terhadap tingkat kemiskinan. Menurut Prasetyoningrum A.K dkk (2018) menurunnya tingkat kemiskinan dikarenakan tingginya IPM yang dapat menggambarkan bahwa IPM mampu meningkatkan pendapatan guna

pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Tingginya IPM menggambarkan bahwa kualitas sumber daya manusia dalam kondisi yang bagus. Peningkatan kualitas sumber daya manusia mempengaruhi peningkatan produktivitas tenaga kerja sehingga pendapatan yang diterima pun akan meningkat. Jika IPM mengalami kenaikan maka pendapatan yang diterima akan naik. Hal ini akan mengakibatkan tingkat kemiskinan turun. Sebaliknya jika IPM turun maka pendapatan yang diterima juga akan turun sehingga tingkat kemiskinan naik.

Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat kemiskinan. Terdapat hubungan yang negatif antara PAD dengan tingkat kemiskinan. Pendapatan asli daerah diperlukan untuk mengatasi tingkat kemiskinan. Hal ini karena masyarakat dengan pendapatan per kapita di bawah garis kemiskinan yang membutuhkan dana atau modal dapat dibantu melalui adanya pendapatan asli daerah. Jika PAD rendah maka kemampuan pemerintah untuk membantu masyarakat dengan pendapatan per kapita di bawah garis kemiskinan rendah. Hal ini menyebabkan tingkat kemiskinan naik. Sebaliknya jika PAD tinggi maka kemampuan pemerintah untuk membantu masyarakat dengan pendapatan per kapita di bawah garis kemiskinan akan tinggi akibatnya tingkat kemiskinan akan rendah.

Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Variabel bebas yang akan diteliti adalah UMK, TPT, IPM dan PAD. Sedangkan variabel terikatnya adalah Tingkat Kemiskinan.



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

2.9 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji dan dibuktikan. Jawaban sementara pada penelitian ini masih berupa titik tolak untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga upah minimum kabupaten/kota berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.
2. Diduga tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.
3. Diduga indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.
4. Diduga pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

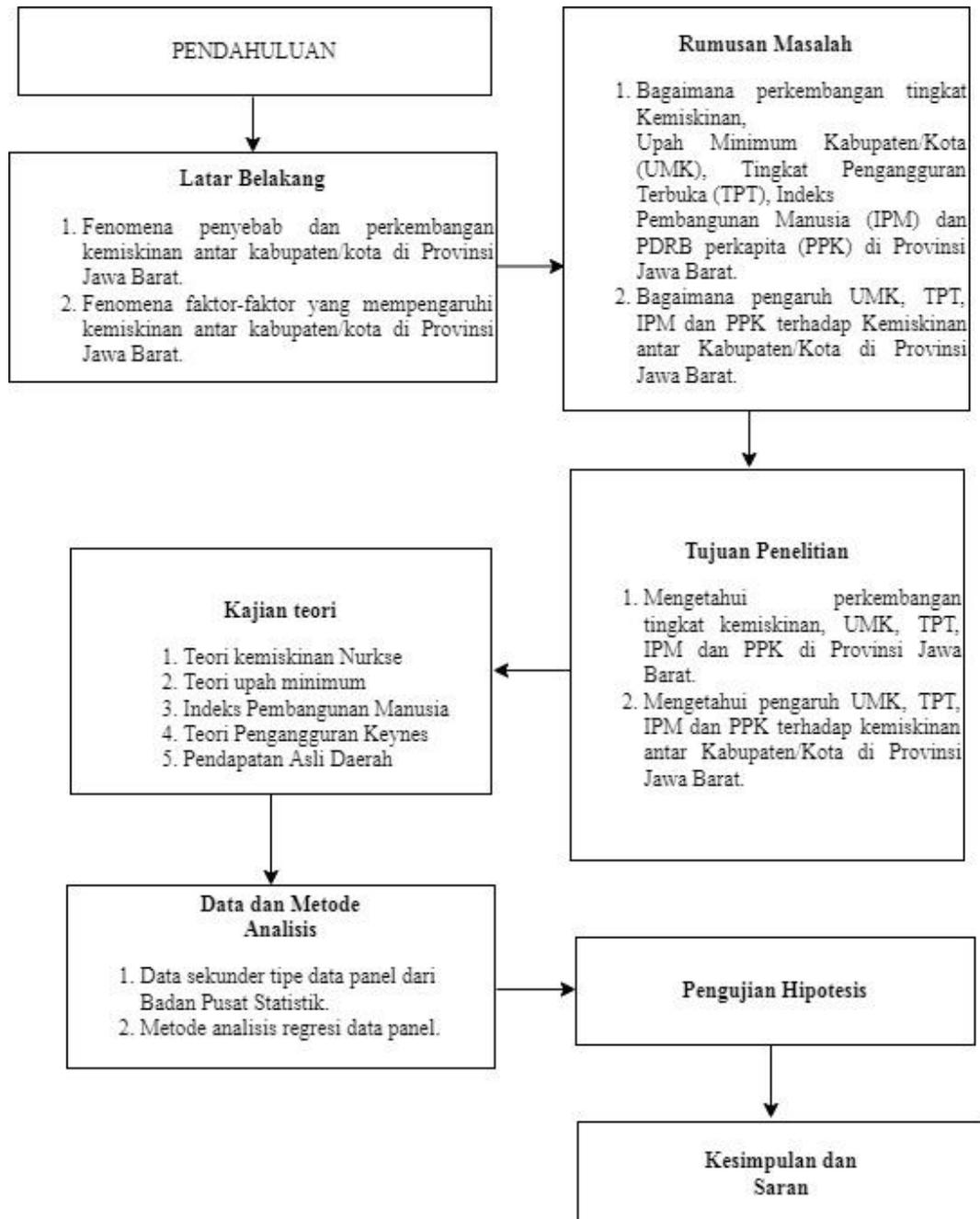
3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena menggunakan data yang berupa angka atau bilangan yang menggunakan teknik statistik untuk menganalisis hasilnya. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif mengacu pada pengumpulan data yang berupa angka dari hasil pengukuran. Dengan demikian pada penelitian ini teknik statistik berperan penting sebagai alat untuk menganalisis jawaban atas suatu masalah.

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif memiliki tahapan-tahapan kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Mendefinisikan dan merumuskan masalah. Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan dengan jelas.
2. Studi pustaka. Mencari teori yang relevan dengan permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya.
3. Menyusun hipotesis yang akan diajukan pada penelitian.
4. Identifikasi dan definisi variabel, hipotesis dan pertanyaan penelitian
5. Mengumpulkan data.
6. Mengolah dan menyajikan data dengan metode analisis data yang sesuai dengan tujuan pada penelitian.
7. Menganalisis hasil dari pengolahan data yang didapatkan dari pengujian hipotesis yang telah diajukan.
8. Membuat kesimpulan dan rekomendasi.

3.2. Desain Penelitian



Gambar 3. 1 Desain Penelitian

3.3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan tipe data panel. Data sekunder tipe data panel yang digunakan merupakan penggabungan antara deret waktu (*time series*) dari tahun 2010-2021 dan deret lintang (*cross section*) sebanyak 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Data yang digunakan diantaranya data persentase penduduk miskin, data upah minimum kabupaten/kota, data tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan pdrb perkapita. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Informasi lain yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan lain berupa jurnal dan buku-buku.

3.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel terikat (*dependen*) dan variabel bebas (*independen*). Variabel terikat pada penelitian ini yaitu kemiskinan. Adapun variabel bebasnya yaitu Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan PDRB Perkapita. Berikut penjelasan definisi operasional pada masing-masing variabel:

Tabel 2.2 Operasional Variabel Penelitian

No.	Jenis Variabel	Nama Variabel	Definisi Variabel	Satuan
1.	Terikat	Tingkat Kemiskinan (Y)	Jumlah persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.	Persen/tahun
2	Bebas	Upah Minimum Kab/Kota (X1)	Upah bulanan terendah yang ditetapkan di sebuah wilayah kabupaten/kota.	Rupiah/Orang/bulan
3	Bebas	Tingkat Pengangguran Terbuka (X2)	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.	Persen/tahun
4	Bebas	Indeks Pembangunan Manusia (X3)	Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup.	Persen/tahun
5	Bebas	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X3)	Penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas,dan penerimaan lain-lain	Ribu Rupiah/tahun

3.5 Metode Analisis Data

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang menggunakan teknik sistematis untuk memperoleh data dengan tujuan mendeskripsikan, membuktikan, mengembangkan, menemukan teori, serta memungkinkannya untuk memahami, memecahkan, dan memprediksi masalah dalam kehidupan manusia. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Prof. Dr Suryana (2010) metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur atau ciri dan sifat terhadap suatu fenomena.

3.5.1 Metode Analisis Deskriptif Kuantitatif

Menurut Arikunto, S (2019) metode analisis deskriptif kuantitatif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data serta penampilan aslinya. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan guna mendapatkan jawaban dan informasi yang luas mengenai suatu fenomena dengan menggunakan tahap-tahap pendekatan kuantitatif

Berkut langkah-langkah analisis deskriptif:

1. Melakukan perumusan masalah.
2. Menentukan jenis informasi atau data.
3. Menentukan prosedur pengumpulan data.
4. Melakukan pengolahan data.
5. Melakukan pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis data.

Pada penelitian ini metode analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengetahui perkembangan tingkat kemiskinan, upah minimum kabupaten/kota, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan PDRB per kapita di Provinsi Jawa Barat dengan cara sebagai berikut:

1. Mencari nilai rata-rata untuk setiap variabel.
2. Mencari nilai tertinggi dan terendah untuk setiap variabel.
3. Membuat grafik.

3.5.2 Metode Analisis Data Panel

Untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Analisis ini merupakan

gabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Data *time series* adalah data yang didapat dalam waktu yang sama terhadap banyak objek. Sedangkan data *cross section* adalah data yang dikumpulkan berdasarkan pada urutan waktu terhadap suatu objek. Data panel merupakan data yang didapatkan dari beberapa individu yang diamati dalam waktu tertentu. Data panel mempunyai unit observasi sebanyak NT . NT diperoleh dari periode waktu T ($t= 1,2,\dots,T$) dan jumlah individu yaitu N ($i=1,2,\dots,N$). Jika unit *cross section* memiliki jumlah observasi *time series* yang sama maka disebut *balanced panel*. Sebaliknya, jika unit *cross section* memiliki jumlah observasi *time series* yang berbeda maka disebut *unbalanced panel*.

Model data panel menggunakan data *time series* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_t = \alpha_0 + \beta_1 X_t + e_t ; t = 1, 2, \dots, T$$

T : Banyaknya data *time series*.

Model data panel menggunakan data *cross section* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_i = \alpha_0 + \beta_1 X_i + e_i ; i = 1, 2, \dots, N$$

N : banyaknya data *cross section*.

Model data panel menggunakan gabungan data *time series* dan *cross section* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_0 + \beta_1 X_{it} + e_{it}$$

Model persamaan pada penelitian ini sebagai berikut:

$$\mathbf{TK} = \mathbf{f}(\mathbf{UMK}, \mathbf{TPT}, \mathbf{IPM}, \mathbf{PAD})$$

Tingkat Kemiskinan = Persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

UMK = Upah Minimum Kabupaten/Kota

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

PAD = Pendapatan Asli Daerah

Pada penelitian ini menggunakan data *time series* selama 12 tahun yaitu 2010-2021 dan data *cross section* sebanyak 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Model penelitian yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

$$\mathbf{TK}_{it} = \alpha\mathbf{0} + \beta_1\mathbf{UMK}_{it} + \beta_2\mathbf{TPT}_{it} + \beta_3\mathbf{IPM}_{it} + \beta_4\mathbf{PAD}_{it} + \mathbf{e}_{it}$$

Keterangan:

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$ = Konstanta Variabel Bebas

Tingkat Kemiskinan = Persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

UMK = Upah Minimum Kabupaten/Kota

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

PAD = Pendapatan Asli Daerah

i = Data *cross section* 27 Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat

t = Data *time series* tahun 2010-2021

ϵ_{it} = Error term

Tabel 3.1 Daftar Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat

No.	Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat	No.	Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat
1	Kabupaten Bandung	15	Kabupaten Subang
2	Kabupaten Bandung Barat	16	Kabupaten Sukabumi
3	Kabupaten Bekasi	17	Kabupaten Sumedang
4	Kabupaten Bogor	18	Kabupaten Tasikmalaya
5	Kabupaten Ciamis	19	Kota Bandung
6	Kabupaten Cianjur	20	Kota Banjar
7	Kabupaten Cirebon	21	Kota Bekasi
8	Kabupaten Garut	22	Kota Bogor
9	Kabupaten Indramayu	23	Kota Cimahi
10	Kabupaten Karawang	24	Kota Cirebon
11	Kabupaten Kuningan	25	Kota Depok
12	Kabupaten Majalengka	26	Kota Sukabumi
13	Kabupaten Pangandaran	27	Kota Tasikmalaya
14	Kabupaten Purwakarta		

Analisis regresi data panel menggunakan estimasi tiga metode pendekatan yaitu sebagai berikut:

1. *Common Effect Model (CEM)*

Model *Common Effect* merupakan teknik yang sederhana guna mengestimasi parameter data panel. Model ini penggabungan data *cross section* dan data *time series* sebagai satu kesatuan tanpa perbedaan waktu dan individu.

Pada model ini menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square (OLS)*.

2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Model *fixed effect* menjelaskan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Model ini menggunakan variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar kabupaten/kota. Pada model ini menggunakan pendekatan bahwa intersep dari setiap individu diasumsikan berbeda sedangkan *slope* antar individu diasumsikan sama. Model estimasi ini sering disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable (LSDV)*.

3. *Random Effect Model (REM)*

Random Effect Model merupakan teknik estimasi yang menambahkan variabel *error terms* yang kemungkinan akan muncul pada hubungan antar waktu dan individu. Pada model ini menggunakan pendekatan bahwa setiap kabupaten/kota diasumsikan memiliki intersep yang berbeda. Intersep tersebut merupakan variabel *random* atau stokastik. Model ini berguna jika individu yang dijadikan sampel dipilih secara *random* atau acak yang dapat menjadi wakil populasi. Pada model ini memperhitungkan bahwa *error* berkorelasi sepanjang *cross section* dan *time series*.

3.6 Penentuan Metode Estimasi

Untuk menentukan mode yang paling tepat, perlu dilakukan beberapa pengujian untuk memilih model data panel yang tepat. Tahap pengujian dapat dilakukan seperti berikut :

3.6.1 Uji Chow atau Uji F

Tujuan uji *Chow Test* yaitu untuk menguji dan membandingkan antar dua model regresi dalam menentukan model mana yang tepat dan sesuai antara

Common Effect atau *fixed Effect* yang akan digunakan untuk melakukan regresi data panel. Langkah-langkah yang dilakukan dalam uji *Chow Test* adalah :

1. Estimasi dengan *Fixed effect*
2. Uji dengan menggunakan *Chow Test*
3. Melihat nilai probability F dan *Chi-square*, dengan asumsi :

Apabila nilai probabilitas F dan *Chi-square* $> 5\%$, maka uji regresi data panel menggunakan model *Common effect*. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas F dan *Chi-square* $< 5\%$, maka uji regresi data panel menggunakan model *Fixed Effect*. Pengujian *F Test* ini dapat dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Jika nilai F-hitung $>$ F-tabel maka H_0 ditolak. Artinya, model yang digunakan adalah *Fixed effect Model*. Jika nilai Probabilitas $< 5\%$ maka H_0 ditolak. Artinya, model yang digunakan adalah *Common Effect Model*.

3.6.2 Uji Hausman

Uji *Hausmant Test* dilakukan untuk membandingkan juga memilih model mana yang tepat dan sesuai antara *Fixed Effect* dengan *Random Effect* yang akan digunakan untuk melakukan regresi data panel. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Estimasi dengan *Random effect*
2. Uji menggunakan *Hausmant Test*
3. Melihat nilai Probability F dan *Chi-square*, dengan asumsi :

Apabila nilai probabilitas F dan *Chi-square* $> 5\%$, maka uji regresi data panel menggunakan *Random Effect Model*. Sebaliknya, apabila probabilitas dan

$Chisquare < 5\%$, maka uji regresi data panel menggunakan model *Fixed Effect Model* atau dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Jika $P\text{-value} < 5\%$ maka H_0 ditolak, artinya model yang cocok untuk digunakan dalam persamaan analisis regresi tersebut adalah *Fixed Effect Model*. Sebaliknya, jika $P\text{-value} > 5\%$ maka H_0 diterima, yang artinya model regresi *Random Effect Model* lebih baik dari pada *Fixed Effect Model*.

3.6.3 Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* berguna untuk mengetahui mana yang lebih baik antara *Common Effect Model* dengan *Random Effect Model*. Langkah yang dilakukan dalam uji *Lagrange Multiplier-Test* sebagai berikut:

1. Estimasi *Common Effect*
2. Uji *Lagrange Multiplier Test*
3. Melihat nilai probabilitas F dan *Chi-square*, dengan asumsi :

Apabila nilai probabilitas y F dan *Chi-square* $> a=5\%$, maka uji regresi data panel menggunakan model *Common Effect*. Sebaliknya, Apabila nilai probabilitas F dan *Chi-square* $< a=5\%$, maka uji regresi data panel menggunakan model *Random effect* atau dapat digunakan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Random Effect Model*

Jika nilai probabilitas pada uji *Lagrange Multiplier* $< a$ maka H_0 ditolak. Artinya, model *Random Effect* lebih cocok digunakan dalam persamaan analisis

regresi tersebut. Sebaliknya, jika nilai probabilitas dalam Uji *Lagrange Multiplier* $> \alpha$ maka H_1 diterima.

3.7 Pengujian Asumsi Klasik

Prasyarat analisis berganda yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik bertujuan untuk memberikan hasil dari model regresi yang mampu memenuhi standar *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Pengujian asumsi klasik terdapat beberapa pengujian yaitu uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi.

3.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat dan variabel bebas memiliki sebaran atau distribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji dengan analisis statistik yaitu uji *Kolmogrov-Smirnov*. Suatu data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila hasil uji *Kolmogrov-Smirnov* terhadap nilai residual dihasilkan nilai signifikansi lebih tinggi dari 5% atau 0,05. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi di bawah 5% atau 0,05 data tersebut tidak terdistribusi normal pada hasil uji *Kolmogrov-Smirnov* terhadap nilai residual. Uji normalitas memiliki hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Sebaran data berdistribusi normal

H_1 : Sebaran data tidak berdistribusi normal

Jika nilai *P-Value* $> 5\%$ atau 0.05 maka H_0 diterima, artinya data tersebut terdistribusi normal. Sebaliknya jika *P-Value* $< 5\%$ atau 0.05 maka H_0 ditolak.

3.7.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016) uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antar variabel bebas. Jika model regresi tidak terdapat adanya multikolinearitas maka model regresi tersebut dinyatakan memenuhi kriteria *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE). Nilai toleransi atau *Tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) berguna untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi.

Untuk mengetahui apakah model regresi terdapat multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai VIF dan nilai *Tolerance*. Jika nilai $VIF > 10$ atau nilai $tolerance < 0,01$ maka model regresi tersebut terdapat multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai $VIF < 10$ atau nilai $tolerance > 0,01$ maka model regresi tersebut tidak terdapat multikolinearitas. Uji multikolinearitas memiliki hipotesis sebagai berikut:

H0 : Tidak terdapat multikolinearitas

H1 : Terdapat multikolinearitas

Jika nilai koefisien korelasi variabel bebas $> 0,8$ maka H0 ditolak artinya model regresi terdapat multikolinearitas. Sedangkan jika nilai koefisien korelasi variabel bebas $< 0,8$ maka H0 diterima artinya tidak terdapat multikolinearitas.

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Pada Uji Heteroskedastisitas ditunjukkan untuk menguji apakah residual dari model yang terbentuk memiliki variabel yang konstan atau tidak. Jika variabel dari residual tersebut konstan atau tetap, maka dapat disebut *homoskedastisitas*. Apabila variabel dari residual tersebut berbeda maka dapat disebut dengan

heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas menggambarkan suatu keadaan ketika asumsi tersebut tidak tercapai atau tidak terbukti. Adanya heteroskedastisitas mencerminkan proses estimasi yang tidak efisien. Uji heteroskedastisitas memiliki hipotesis sebagai berikut:

H0 : Tidak terdapat heteroskedastisitas

H1 : Terdapat heteroskedastisitas

Jika P-Value < 5% maka H0 ditolak, artinya data tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya jika P-Value > 5% maka H0 diterima, artinya tidak terdapat heteroskedastisitas.

3.7.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016) uji autokorelasi muncul ketika terdapat observasi yang berurutan sepanjang waktu dan berkaitan satu sama lain. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk mendeteksi apakah pada model regresi terdapat autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin-Watson Test* dengan menentukan nilai *Durbin-Watson* (DW). Untuk mengetahui apakah model regresi terdapat autokorelasi dapat dengan menggunakan kriteria DW tabel dengan tingkat signifikasnsi 0.05 Uji autokorelasi memiliki hipotesis sebagai berikut:

H0 : Tidak terdapat autokorelasi

H1 : Terdapat autokorelasi

1. Jika angka DW di bawah -2 terdapat autokorelasi positif.
2. Jika angka DW berada diantara -2 sampai +2 maka tidak terdapat autokorelasi.
3. Jika angka DW di atas +2 maka terdapat autokorelasi negatif.

3.8 Pengujian Statistik

Pengujian statistik diperlukan untuk menguji besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Beberapa uji statistik yang akan dilakukan sebagai berikut:

3.8.1 Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk menguji pengaruh dari setiap masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji statistik t dilakukan dengan membandingkan t-hitung terhadap t-tabel dengan ketentuan sebagai berikut :

H0 : $b_1 = 0$, tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) (X1) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y).

H1 : $b_1 \neq 0$, terdapat pengaruh signifikan antara variabel UMK (X1) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y).

H0 : $b_2 = 0$, tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap anatar variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (X2) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y).

H1 : $b_2 \neq 0$, terdapat pengaruh signifikan antara variabel TPT (X2) terhadap terhadap Tingkat Kemiskinan (Y).

H0 : $b_3 = 0$, tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X3) terhadap terhadap Tingkat Kemiskinan (Y).

H1 : $b_3 \neq 0$, terdapat pengaruh signifikan antara variabel IPM (X3) terhadap terhadap Tingkat Kemiskinan (Y).

H0 : $b_4 = 0$, tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X4) terhadap terhadap Tingkat Kemiskinan (Y).

$H_1 : b_4 \neq 0$, terdapat pengaruh signifikan antara variabel PAD (X3) terhadap terhadap Tingkat Kemiskinan (Y).

$\alpha = 0,1$. Nilai t-hitung dibandingkan dengan t-tabel dan ketentuannya sebagai berikut :

- Jika $t\text{-hitung} \geq t\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak sedangkan H_1 diterima. Menjelaskan bahwa, Taraf nyata yang digunakan adalah variabel independent secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka H_0 diterima sedangkan H_1 ditolak. Menjelaskan bahwa, variable independent secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3. 2 Uji t

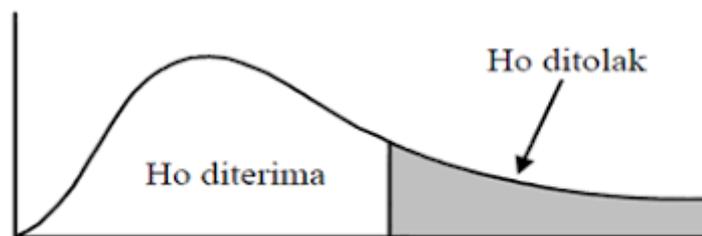
3.8.2 Uji Statistik F

Uji statistik F merupakan metode pengujian yang dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel dengan ketentuan sebagai berikut :

$H_0 : b_1, b_2, b_3, b_4 = 0$, Upah Minimum Kabupaten/Kota (X1), Tingkat Pengangguran Terbuka (X2), Indeks Pembangunan Manusia (X3), dan Pendapatan Asli Daerah (X4) tidak terdapat pengaruh terhadap Kemiskinan (Y) secara simultan.

$H_1 : b_1, b_2, b_3, b_4 \neq 0$, Upah Minimum Kabupaten/Kota (X1), Tingkat Pengangguran Terbuka (X2), Indeks Pembangunan Manusia (X3), dan Pendapatan Asli Daerah (X4) terdapat pengaruh terhadap Kemiskinan (Y) secara simultan.

1. Apabila nilai signifikan $F < 0,05$, maka H_0 ditolak, H_1 diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat.
2. Apabila nilai signifikan $F > 0,05$, maka H_0 diterima, H_1 ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat.



Gambar 3. 3 Uji F

3.8.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2016) pengujian koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa besar pengaruh variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat yang diindikasikan oleh nilai *adjusted R-Squared*. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1 atau $0 < R^2 < 1$. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai R^2 mendekati 1. Artinya variabel bebas dapat menjelaskan mengenai variabel terikat.
2. Jika nilai R^2 menjauhi 1. Artinya, variabel bebas tidak dapat menjelaskan mengenai variabel terikat.